



## Seribu Rekomendasi BPK untuk Enrekang

# Seribu Rekomendasi BPK untuk Enrekang

REPORTER AMASTASHA  
EDITOR RIDWAN MARZUKI

**ENREKANG, FAJAR —** Fiskal Enrekang benar-benar banyak masalah. BPK bahkan telah mengeluarkan seribuan rekomendasi.

**PEMKAB** Enrekang merupakan daerah dengan utang jumbo itu di Sulsel. DPRD pun akan membahas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Sulsel Semester II 2024 yang membuat bejibun rekomendasi.

Pemkab Enrekang menjadi salah satu kabupaten/kota dari tujuh yang memiliki rekomendasi perbaikan

an dari BPK Sulsel. Dengan 1.134 rekomendasi, 1.078 merupakan rekomendasi sebelumnya dan 56 rekomendasi tambahan.

Ketua DPRD Enrekang Ikrar Eran Batu mengungkapkan pihaknya akan membahas bersama Pemkab Enrekang terkait rekomendasi LHP BPK Sulsel. Terutama karena banyaknya reko-

mendasi dikeluarkan.

"Ada banyak rekomendasi. Nanti di dalam (rapat) kita tindak lanjut di DPRD. Iya, semua catatan BPK akan dibahas dan tindak lanjutnya dijawab Pemda," ucap Ikrar, Minggu, 12 Januari 2025.

Dewan akan mengadakan pertemuan dengan Pemkab Enrekang dalam waktu dekat karena perbaikan tersebut diberi waktu selama 60 hari setelah menerima LHP itu.

"Baru dijadwalkan, karena ada masa tenggang waktunya harus di bahas tindak lanjutnya," tambah Ikrar.

Secara garis besar, re-

komendasi LHP BPK Sulsel untuk Pemkab Enrekang, yakni permintaan menyelaraskan indikator makro dan mendukung program prioritas nasional. "Termasuk prioritas penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)," tutur Legislator Nasdem ini.

### Perbaikan

Penjabat Bupati Enrekang Marwan Mansyur mengakui memang banyak perbaikan yang harus dilakukan dari LHP BPK Sulsel. "Banyak catatan untuk perbaikan kinerja," ucapnya.

Marwan berkomitmen untuk melakukan perbaikan sesuai dengan waktu yang

diberikan oleh BPK Sulsel.

Pada Oktober 2024, Enrekang berada dalam tata kelola keuangan yang buruk. Mereka terilit utang hingga nyaris di atas Rp700 miliar. Mulai dari utang PEN senilai Rp400 miliar lebih, hingga utang pihak ketiga yang mencapai Rp300 miliar lebih.

Kondisi ini memberikan dampak buruk bagi masyarakat, sebab mereka harus mendapat imbas dari buruknya tata kelola keuangan daerah ini. Gaji PPPK sebagian masih tertunggak, utang BPJS 2022 dan 2023, kontraktor, dan beberapa lainnya. (\*)



**KEARIFAN LOKAL.** Warga menggelar Festival Oni-oni Latimojong di Kelurahan Baraka, Kecamatan Baraka, Enrekang, Jumat, 23 Agustus 2024. Saat ini, Pemkab setempat sedang mengalami turbulensi anggaran.